

ANALISIS PEMENUHAN 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA SMP NEGERI DI SULAWESI SELATAN

Ratmawati¹⁾ dan Ismail Tolla²⁾

Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar

Abstract: *The purpose of this study is to assess the fulfillment of eight national education standards (SNP) at SMP Negeri in South Sulawesi. The research method used a combination of quantitative descriptive approach and qualitative approach. Qualitative descriptive approach is depiction of research results in percentage form. Qualitative approach is the depiction of research results in the form of categories. The research location covers 3 districts / cities as the sample which is determined based on the location of the region that is, the South region is represented Makassar City, the West area is Pareare City, and Southeast region, represented by Regency of Bone. samples, 2 SMPNs were chosen, each 1 SMPN accredited A and 1 SMPN accreditation B, so the number of samples is 6 SMPN. The instruments used were questionnaires developed from national education standard indicators (SNPs) equipped with documentation, and interviews. The result of data analysis shows that the percentage of compliance level of 8 national standard of education at SMP Negeri in South Sulawesi successively as follows: (1) standard content 86% or very good category, (2) standard process 88% or very good category, (3)) the competency standard is 84% or good category, (4) standard of educator and educational staff 72% or good category, (5)) standard of facilities and infrastructure 75% or good category, (6) 90% management standard or very good category, (7) 73% financing standard or good category, and (8) 87% rating standard or very good category. Among the eight standards that include low level of engagement, one of them is the standard of educators and education personnel, especially the education personnel, namely principals, labors, and librarians are still many who have not met the standards because they do not have a certificate of competence. Suggestions for the follow-up that ownership of competency certificates for school principals, labors, and school librarians should be a priority requirement by local governments in recruitment.*

Keywords: *Fulfillment of Eight National Standard of Education (SNP)*

Pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan serangkaian proses memenuhi tuntutan mutu pendidikan nasional yang menjadi acuan pada setiap jenjang satuan pendidikan. Implementasinya diatur secara bertahap, terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan

local, nasional, dan global. Undang-Undang Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Pasal 1 Ayat (17) berbunyi “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SPN) Pasal 2 ayat (1) ditetapkan lingkup standar nasional pendidikan, meliputi: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Pasal 3 Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Selanjutnya, Pasal 4 Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Bab II disebutkan Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Nasional. Pasal 2 berbunyi pendidikan nasional

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 3 menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sementara SNP dijadikan sebagai instrumen penetapan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP berfungsi sebagai dasar penjaminan dan pengendali dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan nasional yang dilakukan melalui evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Berikut diuraikan dalam tabel indikator pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Keterpenuhan SNP pada tingkat satuan pendidikan (sekolah) merupakan tanggung jawab kepala sekolah sebagai *top leader* dalam kaitannya penjaminan mutu sekolah. Pemenuhan 8 SNP pada SMP Negeri menjadi fokus pengkajian penelitian ini. Hal ini dipandang penting untuk perumusan kebijakan peningkatan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri secara berkelanjutan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Adapun rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini sebagai berikut: a). Bagaimana gambaran pemenuhan 8 standar nasional pendidikan (SNP) pada SMP Negeri di Sulawesi Selatan?, dan b). Faktor-faktor apa yang dihadapi oleh pihak manajemen SMP Negeri dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan di Sulawesi Selatan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisis persentase. Lokasi penelitian adalah Sulawesi Selatan. SMP Negeri di Sulawesi Selatan

yang dijadikan lokasi penelitian. Populasi (sumber data) adalah kepala sekolah dan guru-guru di setiap SMP yang diberi tugas oleh kepala sekolah memonitoring pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan.

Penentuan sampel dilakukan 3 (tiga) tahap. *Pertama*, penentuan sampel kabupaten/kota yang dipilih purposive, meliputi (1) Kota Makassar, (2) Kota Parepare, dan (3) Kabupaten Bone. *Kedua*, dari setiap kabupaten/kota sampel dipilih 2 buah SMP Negeri masing-masing 1 buah akreditasi A, dan 1 buah akreditasi B. *Ketiga*, sumber data adalah kepala sekolah dan guru-guru yang ditugasi oleh kepala sekolah memonitoring pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan pada setiap SMPN sampel. Melalui prosedur tersebut, terpilih 6 buah SMP Negeri masing-masing 3 buah SMP akreditasi A dan 3 buah SMP akreditasi B. Jumlah sumber data yaitu 6 kepala sekolah dan 48 guru yang bertugas memonitoring pelaksanaan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Kriteria *purposive sampling* yang digunakan didasarkan pada jumlah SMP Negeri yang

berakreditasi A dan B yang terdapat di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, dokumentasi dan wawancara. Angket dikembangkan dari indikator 8 standar nasional pendidikan, dokumen digunakan untuk menjaring dokumen-dokumen bukti keterlaksanaan program, dan wawancara digunakan untuk mengklarifikasi perolehan data dan informasi yang dipandang belum lengkap.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, dokumentasi, dan wawancara. Angket digunakan menjaring data persepsi responden tentang kondisi objektif kegiatan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang berlangsung di SMP sampel. Dokumentasi digunakan menjaring data dokumen pelaksanaan program 8 standar SNP yang tersedia pada SMPN sampel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis persentase (%) dalam mendeskripsikan capaian 8 standar nasional pendidikan pada tingkat SMP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian keterpenuhan 8 standar nasional pendidikan pada SMP Negeri di Sulawesi Selatan sudah berada pada kategori Baik, hal ini dapat dilihat pada hasil analisis data dari 3 wilayah diwakili Kota Makasar, Wilayah Barat diwakili Kota Parepare, dan Wilayah Tenggara diwakili Kabupaten Bone. Dari setiap Kabupaten/Kota sampel dipilih 2 buah SMP Negeri yaitu 1buah SMPN akreditasi A, dan 1 buah SMPN akreditasi B. Hasil analisis data yang di analisis deskriptif (%) untuk data yang di jaring melalui angket berdasarkan kriteria pemenuhan 8 SNP sebagai berikut:

Hasil Rekapitulasi Pemenuhan 8 SNP Pada SMPN Di Sul-Sel

No	Komponen Standar	Hasil dalam %	Ketercapaian
1	Standar Isi	86%	Sangat Baik
2	Standar Proses	88%	Sangat Baik
3	Standar Kelulusan	78%	Baik
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	73%	Baik
5	Standar Sarana Dan Prasarana	75%	Baik
6	Standar Pengelolaan	90%	Sangat Baik
7	Standar Pembiayaan	74%	Baik
8	Standar Penilaian	93%	Sangat Baik

Temuan penelitian ini menunjukkan sebagian dari semua indikator pada 8 SNP sudah terpenuhi seperti indikator standar isi yang terpenuhi pada SMP Negeri di Sulawesi Selatan, namun masih ada indikator yang terkesan masih lemah dalam penerapannya, antara lain pengembangan silabus mata pelajaran yang menggunakan 7 langkah pengembangan, penyusunan RPP yang berdasarkan prinsip mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran, pengembangan budaya membaca dan menulis, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa indikator standar proses yang

terpenuhi sekaligus menjadi kekuatan antara lain: guru-guru mengembangkan Silabus secara mandiri, guru-guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai KTSP. Demikian juga kepala sekolah telah melaksanakan supervisi pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, kepala sekolah menindak lanjuti hasil supervise. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator pelaksanaan yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

Penelitian ini menemukan beberapa indikator yang masih lemah antara lain lain; masih banyak guru belum menerapkan berbagai jenis tes dalam mengevaluasi pembelajaran melalui penilaian formatif dan summative. Pada hal penggunaan jenis-

jenis tes dalam menilai pembelajaran amat penting dalam memberikan pengalaman siswa untuk memahami penerapan jenis-jenis tes. Demikian juga perilaku supervisi akademik kepala sekolah, masih banyak yang belum menerapkan teknik-teknik supervisi akademik secara simultan dalam mengembangkan kemampuan profesionalisme guru. Temuan penelitian menunjukkan teknik supervisi akademik kunjungan kelas yang paling sering dilakukan oleh kepala sekolah, sementara teknik observasi kelas, teknik pertemuan individual, teknik kunjungan antar kelas, teknik menilai diri sendiri, dan teknik supervisi kelompok sangat jarang diterapkan. Temuan ini sejalan dengan kasus yang diungkapkan oleh LPPKS, 2015) : sering dijumpai adanya seorang kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik hanya datang ke sekolah dengan membawa instrumen pengukuran unjuk kerja. Kemudian masuk ke kelas melakukan pengukuran terhadap unjuk kerja guru yang sedang mengajar. Setelah itu, selesailah tugasnya, seakan-akan supervisi akademik sama dengan

penilaian guru dalam pelaksanaan pembelajaran (LPPKS, 2016).

Temuan penelitian terhadap pemenuhan standar kompetensi kelulusan menunjukkan bahwa hasil belajar: (1) rata-rata nilai mata pelajaran setiap kelas menunjukkan peningkatan dari setiap semester, (2) tingkat kelulusan meningkat dari tahun ke tahun, (3) angka tinggal kelas dan drop out menurun. Temuan penelitian yang memerlukan penegasan, antara lain; hasil belajar peserta didik belum semua mata pelajaran melampaui standar nasional yaitu nilai 75.

Indikator keterpenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: (1) 75% kualifikasi guru S-1/D.IV; (2) 75% guru mengajar sesuai latar belakang ijazah; (3) kualifikasi pendidikan kepala sekolah, wakasek dan tenaga pendidik semua sudah S-1; (4) mempunyai Tata Usaha sesuai standar; (5) tenaga laboran, pustakawan dan tenaga administrasi 75% sesuai keahlian pendidikan; (6) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 90% berperilaku baik; (7) kepala sekolah memiliki pengalaman sebagai pendidik; (8)

memiliki guru BK yang cukup memadai; (9) kepala sekolah melaksanakan supervise dengan baik. Temuan penelitian menunjukan bahwa semua indikator tersebut di atas memiliki dokumen di sekolah. Namun ada beberapa hal yang masih perlu di ulas lebih lanjut. Pertama, persyaratan kepala sekolah dari segi kualifikasi S-1/D IV sudah terpenuhi bahkan sudah beberapa kepala SMP berkualifikasi S-2 dan S-3. Demikian pula persyaratan kualifikasi guru S-1/D IV sudah melampaui standar 75%. Selain kekuatan, juga terdapat beberapa kelemahan, antara lain; pengangkatan kepala sekolah realitasnya lebih berorientasi ke kepentingan politis praktis seperti pengkavlingan jabatan. Konsekuensinya, sertifikat kepala sekolah (SKS) yang dipersyaratkan oleh Pemmren 13 Tahun 2007 Tentang Kompetensi Kepala Sekolah nyaris tidak berlaku dalam pengangkatan kepala sekolah. Temuan penelitian lainnya, terdapat beberapa SMP belum memiliki tenaga laboran dan pustakawan. Apabila SMP belum memiliki tenaga laboran dan pustakawan, maka tugas tersebut menjadi tugas tambahan guru.

Indikator sarana dan prasarana, secara umum indikator sarana dan prasarana tersedia pada semua sekolah, namun dari segi kualitas tampaknya belum memadai. Komponen prasarana yang masih belum banyak sekolah memilikinya adalah kamar mandi khusus kepala sekolah dan ruang serbaguna untuk pengembangan minat dan bakat siswa. Misalnya, penggiatan berbagai lomba seperti olah raga, kesenian, drama, puisi, dan layanan klinis lainnya. Untuk indikator sarana yang belum memadai, terutama peralatan pembelajaran laboratorium IPA, Biologi, dan Fisika, peralatan perpustakaan seperti computer untuk menyimpan data katalog atau perpustakaan digital, fasilitas dan peralatan olah raga dan kesenian. Berdasarkan temuan tersebut, maka prioritas kebijakan pemenuhan standar sarana dan prasarana perlu lebih ditekankan pada kelengkapan peralatan pembelajaran dan modernisasi layanan perpustakaan melalui perpustakaan digital. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong budaya gemar membaca oleh warga sekolah terutama para siswa.

Pembahasan hasil penelitian dikemukakan menurut komponen 8 SNP berikut: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar saran dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian.

Standar Isi

Temuan penelitian ini menunjukkan sebagian besar indikator standar isi yang terpenuhi pada SMP Negeri di Sulawesi Selatan. Indikator yang sudah terpenuhi itu antara lain: telah melaksanakan KTSP pada semua mata pelajaran, telah melaksanakan kegiatan pengembangan KTSP sesuai ketentuan, memiliki dokumen kurikulum berupa dokumen I (buku KTSP) dan silabus untuk semua mata pelajaran, memiliki dokumen kegiatan remedial dan pengayaan oleh guru, memiliki dokumen kegiatan Bimbingan Konseling dan ekstra kurikuler, memiliki dokumen Standar Kompetensi (SK) untuk semua mata pelajaran, memiliki dokumen kalender akademik, telah memiliki dokumen Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM). Juga telah melakukan pengembangan kurikulum muatan lokal yang berorientasi pada kebutuhan daerah, kebutuhan social masyarakat, pengembangan budaya, pengembangan potensi social yang bedaya saing nasional maupun internasional.

Indikator yang terkesan masih lemah dalam penerapannya, antara lain pengembangan silabus mata pelajaran yang menggunakan 7 langkah pengembangan, penyusunan RPP yang berdasarkan prinsip mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran, pengembangan budayan membaca dan menulis, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

Standar Proses

Temuan penelitian menunjukkan indikator standar proses yang terpenuhi sekaligus menjadi kekuatan antara lain: guru-guru mengembangkan Silabus secara mandiri, guru-guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai KTSP, guru-guru menyusun RPP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik yaitu: kemampuan awal peserta didik, tingkat intelektual, minat dan

bakat, motivasi belajar, kemampuan social, gaya belajar, kebutuhan khusus, dan latar belakang budaya (multi kultur). Demikian juga kepala sekolah telah melaksanakan supervisi pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, kepala sekolah menindak lanjuti hasil supervise. Kepala sekolah melaksanakan supervise pembelajaran dengan memperhatikan 4 tahap pembelajaran: (1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi pembelajaran, dan (4) rencana tindak lanjut.

Dari sejumlah indikator standar proses yang dikemukakan telah tersedia di sekolah dan dilaksanakan sesuai standar. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator pelaksanaan yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Penelitian ini menemukan beberapa indikator yang masih lemah antara lain lain; masih banyak guru belum menerapkan berbagai jenis tes dalam mengevaluasi pembelajaran melalui penilaian formatif dan summative. Padahal penggunaan jenis-jenis tes dalam menilai pembelajaran amat penting dalam memberikan pengalaman siswa untuk memahami penerapan jenis-jenis

tes. Demikian juga perilaku supervisi akademik kepala sekolah, masih banyak yang belum menerapkan teknik-teknik supervisi akademik secara simultan dalam mengembangkan kemampuan profesionalisme guru. Temuan penelitian menunjukkan teknik supervisi akademik kunjungan kelas yang paling sering dilakukan oleh kepala sekolah, sementara teknik observasi kelas, teknik pertemuan individual, teknik kunjungan antar kelas, teknik menilai diri sendiri, dan teknik supervisi kelompok sangat jarang diterapkan. Temuan ini sejalan dengan kasus yang diungkapkan oleh (LPPKS, 2015) :sering dijumpai adanya seorang kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik hanya datang ke sekolah dengan membawa instrumen pengukuran unjuk kerja. Kemudian masuk ke kelas melakukan pengukuran terhadap unjuk kerja guru yang sedang mengajar. Setelah itu, selesailah tugasnya, seakan-akan supervisi akademik sama dengan penilaian guru dalam pelaksanaan pembelajaran (LPPKS, 2016).

Perilaku supervisi akademik sebagaimana digambarkan di atas

merupakan salah satu contoh perilaku supervisi akademik yang salah. Karena supervisi akademik sama sekali bukan penilaian unjuk kerja guru melainkan meningkatkan kualitas kompetensi guru.

Standar Kompetensi Kelulusan

Temuan penelitian pemenuhan standar kompetensi kelulusan menunjukkan beberapa hal: (1) memiliki dokumen Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk kelompok mata pelajaran yang meliputi: Iptek, IPS dan Seni Budaya; (2) guru mengajar dengan mengutamakan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran; (3) guru melaksanakan proses pembelajaran sebagian besar menggunakan CTL; (4) menggunakan media pembelajaran lingkungan; (5) melatih siswa berfikir kritis, kreatif dan inovatif; (6) melaksanakan proses pembelajaran pembiasaan; (7) siswa memperoleh pengalaman di bidang seni dan budaya; (8) siswa dilatih memperoleh pengalaman berjiwa/ sikap sportif; (9) siswa diberi pengalaman dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara. Temuan penelitian hasil belajar: (1) rata-rata nilai mata pelajaran

setiap kelas menunjukkan peningkatan dari setiap semester, (2) tingkat kelulusan meningkat dari tahun ke tahun, (3) angka tinggal kelas dan drop out menurun. Temuan penelitian yang memerlukan peneguhan, antara lain; hasil belajar peserta didik belum semua mata pelajaran melampau standar nasional yaitu nilai 75.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator keterpenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: (1) 75% kualifikasi guru S-1/D.IV; (2) 75% guru mengajar sesuai latar belakang ijazah; (3) kualifikasi pendidikan kepala sekolah, wakasek dan tenaga pendidik semua sudah S-1; (4) mempunyai Tata Usaha sesuai standar; (5) tenaga laboran, pustakawan dan tenaga administrasi 75% sesuai keahlian pendidikan; (6) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 90% berperilaku baik; (7) kepala sekolah memiliki pengalaman sebagai pendidik; (8) memiliki guru BK yang cukup memadai; (9) kepala sekolah melaksanakan supervise dengan baik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa semua indikator tersebut di atas memiliki dokumen di sekolah. Namun ada beberapa hal yang masih perlu di ulas lebih lanjut. Pertama, jenis ketenagaan yang terdapat di SMP terdiri atas (1) kepala sekolah, (2) wakil kepala sekolah, (3) guru mata pelajaran, (4) guru pembimbing, (5) laboran, (6) pustakawan, (7) pegawai tata usaha (termasuk keamanan sekolah). Kedua, persyaratan kepala sekolah dari segi kualifikasi S-1/D IV sudah terpenuhi bahkan sudah beberapa kepala SMP berkualifikasi S-2 dan S-3. Demikian pula persyaratan kualifikasi guru S-1/D IV sudah melampaui standar 75%. Selain kekuatan, juga terdapat beberapa kelemahan, antara lain; pengangkatan kepala sekolah realitasnya lebih berorientasi ke kepentingan politis praktis seperti pengkavlingan jabatan. Konsekuensinya, sertifikat kepala sekolah (SKS) yang dipersyaratkan oleh Pmrmen 13 Tahun 2007 Tentang Kompetensi Kepala Sekolah nyaris tidak berlaku dalam pengangkatan kepala sekolah. Temuan penelitian lainnya, terdapat beberapa SMP belum memiliki

tenaga laboran dan pustakawan. Apabila SMP belum memiliki tenaga laboran dan pustakawan, maka tugas tersebut menjadi tugas tambahan guru.

Standar Sarana dan Prasarana

Indikator sarana dan prasarana, meliputi: (1) memiliki luas lahan sesuai ketentuan; (2) memiliki gedung sekolah sendiri; (3) memiliki ruang Kepala Sekolah dengan ruang TU; (4) memiliki sarana /prasarana belajar yang cukup; (5) memiliki ruang laboratorium (IPA Biologi, IPA Fisika, Ruang Perpustakaan dan Ruang Keterampilan; (6) memiliki ruang BK, OSIS, Pramuka, UKS; (7) memiliki ruang guru; (8) terdapat Musholla; (9) terdapat fasilitas olah raga (alat dan lapangan); (10) terdapat gudang dan aula.

Meskipun secara umum, indikator sarana dan prasarana tersebut di atas tersedia pada semua sekolah, namun dari segi kualitas tampaknya belum memadai. Komponen prasarana yang masih belum banyak sekolah memilikinya adalah kamar mandi khusus kepala sekolah dan ruang serbaguna untuk pengembangan minat dan bakat siswa. Misalnya, penggiatan

berbagai lomba seperti olah raga, kesenian, drama, puisi, dan layanan klinis lainnya. Untuk indikator sarana yang belum memadai, terutama peralatan pembelajaran laboratorium IPA, Biologi, dan Fisika, peralatan perpustakaan seperti computer untuk menyimpan data katalog atau perpustakaan digital, fasilitas dan peralatan olah raga dan kesenian.

Berdasarkan temuan tersebut, maka prioritas kebijakan pemenuhan standar sarana dan prasarana perlu lebih ditekankan pada kelengkapan peralatan pembelajaran dan modernisasi layanan perpustakaan melalui perpustakaan digital. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong budaya gemar membaca oleh warga sekolah terutama para siswa.

Standar Pengelolaan

Indikator Standar Pengelolaan, meliputi: (1) terdapat rumusan visi-misi, dan tujuan sekolah; (2) memiliki program kerja menengah (4 tahun) dan program kerja tahunan; (3) memiliki dokumen pengelolaan 8 Standar Nasional Pendidikan; (4) memiliki struktur organisasi sekolah; (5) ada program pemberdayaan pendidik dan

tenaga kependidikan; (6) terdapat dokumen pengelolaan pembiayaan; (7) memiliki dokumen pembinaan kesiswaan; (8) memiliki dokumen pengelolaan sarana dan prasarana; (9) ada aturan untuk mengendalikan tata tertib dan keamanan sekolah; (10) memiliki dokumen pengelolaan pembelajaran; (11) memiliki dokumen supervisi guru; (12) memiliki dokumen pengelolaan pegawai.

Temuan penelitian keterpenuhan standar pengelolaan menunjukkan bahwa pencapaian indikator standar pengelolaan pada umumnya sudah berada di atas rata-rata berdasarkan hasil pengkajian dokumen yang dimiliki sekolah. Tidak kalah pentingnya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen (SIM) sekolah belum terkelola secara efektif dan efisien. Artinya belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan administrasi pendidikan yang efektif dan efisien, dan akuntabel. SIM sahinya menyediakan dokumen fasilitas informasi atau pangkalan data yang mudah diakses baik berupa permintaan informasi maupun

pemberian informasi dari pemangku kepentingan berkaitan dengan pengelolaan sekolah baik secara lisan maupun tertulis. Untuk itu pengembangan SIM di sekolah perlu menjadi prioritas dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi standar pengelolaan.

Standar Pembiayaan

Indikator Standar Pembiayaan meliputi: (1) memiliki dokumen nilai asset; (2) terdapat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS); (3) memiliki modal kerja/anggaran untuk pembiayaan sekolah; (4) memiliki data pembayaran gaji/upah; (5) memiliki anggaran pembiayaan sarana dan prasarana; (6) memiliki anggaran pembiayaan ujian semester, ujian sekolah dan UN; (7) memiliki data sumber dana yang jelas dan teratur; (8) terdapat laporan pertanggung jawaban keuangan tahunan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan tingkat SLTP termasuk jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan wajib belajar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 34 ayat (2) berbunyi “Pememerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Pemerintah menyediakan pembiayaan sekolah melalui dua jenis anggaran yaitu dana BOS dan Hibah yang disertai SOP. Dengan demikian, tugas utama sekolah dalam standar pembiayaan hanya membuat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan dokumen realisasi seperti tersebut di atas.

Standar Penilaian Pendidikan

Indikator Standar Penilaian, meliputi: (1) setiap guru merancang kriteria penilaian yang di muat dalam silabus; (2) setiap silabus mata pelajaran dilengkapi dengan indikator pencapaian Kompetensi Dasar (KD); (3) guru memiliki dan mengembangkan berbagai instrumen penilaian; (4) setiap mata pelajaran dilengkapi dengan pedoman penilaian sesuai bentuk dan tekniknya; (5) guru memiliki dokumen hasil penilaian; (6) guru menganalisis hasil penilaian untuk kegiatan perbaikan; (7) setiap mata pelajaran di tetapkan KKM-

nya; (8) sekolah memiliki program evaluasi semester dan ujian akhir semester; (9) sekolah memiliki dokumen hasil ujian 2 tahun terakhir; (10) sekolah memiliki dokumen penerbitan Ijazah.

Temuan penelitian pemenuhan standar penilaian menunjukkan bahwa semua indikator standar penilaian tersebut di atas terpenuhi berdasarkan dokumen yang terdapat di sekolah. Namun terdapat beberapa indikator yang masih perlu dibahas lebih lanjut. Temuan yang tidak kalah pentingnya dari penelitian ini, antara lain belum semua guru menggunakan berbagai bentuk dan jenis tes dalam menilai hasil belajar melalui tes formatif dan tes summative. Hanya bentuk tes esai dan tes pilihan ganda yang paling populer bagi para guru yang digunakan pada tes formatif dan summative. Pada hal idealnya semua jenis tes penting diterapkan melalui tes formatif dan tes summative agar siswa memiliki pemahaman luas terhadap berbagai bentuk dan jenis tes. Demikian juga masih jarang guru memiliki portofolio rekaman jejak perilaku siswa baik secara

individual maupun kelompok. Berdasarkan temuan tersebut, maka prioritas untuk kebijakan pembinaan guru lebih diarahkan pada kemampuan dan keterampilan pengembangan berbagai bentuk dan jenis instrumen penilaian seperti instrumen evaluasi, instrument pengukuran, dan asesmen hasil belajar. Hal ini berguna untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan penilaian sebagai salah satu tugas pokok guru sebagai agen pembelajaran.

SIMPULAN

Standar Isi

Indikator standar isi yang terpenuhi berdasarkan kepemilikan dokumen meliputi: (1) dokumen pengembangan kurikulum; (2) dokumen pengelompokan kurikulum mata pelajaran; (3) dokumen penyusunan kurikulum untuk setiap mata pelajaran; (4) dokumen kalender pendidikan; (5) dokumen pengembangan kurikulum muatan local; (6) dokumen penyusunan silabus dan RPP, demikian juga pelaksanaannya sudah termasuk kategori baik.

Standar Proses

Kriteria standar proses yang terpenuhi sesuai indikator, meliputi: (1) dokumen silabus menjadi acuan dalam pengembangan RPP; (2) dokumen identitas mata pelajaran; (3) Standar Kompetensi & Kompetensi Dasar; (4) dokumen indikator pencapaian kompetensi; (5) dokumen materi ajar; (6) dokumen penilaian hasil belajar; (7) dan dokumen capaian kemajuan hasil belajar meningkat secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Sedangkan Indikator yang belum terpenuhi adalah supervisi kepala sekolah yang belum menerapkan teknik-teknik supervise dalam pengembangan dan pembinaan pelaksanaan profesionalisme guru.

Standar Kompetensi Kelulusan

Indikator standar kompetensi kelulusan yang terpenuhi, meliputi: (1) memiliki dokumen Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM); (2) memiliki dokumen guru mengajar; (3) memiliki dokumen guru melaksanakan proses pembelajaran menggunakan CTL; (4) dokumen menggunakan media pembelajaran lingkungan; (5) dokumen melatih siswa berfikir kritis, kreatif dan inovatif; (6)

dokumen melaksanakan proses pembelajaran pembiasaan; (7) dokumen siswa memperoleh pengalaman di bidang seni dan budaya; (8) dokumen siswa dilatih memperoleh pengalaman berjiwa/ sikap sportif; (9) dokumen siswa diberi pengalaman dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara. Temuan penelitian yang memerlukan peneguhan, antara lain; hasil belajar peserta didik belum semua mata pelajaran melampau standar nasional yaitu nilai 75.

Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator standar pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi, meliputi:

- a. Tenaga Pendidik: 75% kualifikasi guru S-1/ D.IV; dan guru mengajar sesuai latar belakang ijazah; dan berperilaku baik.
- b. Tenaga Kependidikan (kepala sekolah). Indikator yang terpenuhi: (1) kualifikasi pendidikan sudah S-1/D IV; (2) memiliki pengalaman sebagai pendidik (3) memiliki sertifikat pendidik (4) tenaga pendik dan tenaga kependidikan 90% berperilaku baik.

Indikator yang belum terpenuhi, meliputi: (1) pendidikan tenaga Tata Usaha sebagian sebagian besar belum sesuai standar; (2) tugas laboran dan pustakawan sebagian besar dijalankan oleh guru mata pelajaran, (3) sebagian besar tugas BK dijalankan oleh guru mata pelajaran; (4) rekrutmen kepala sekolah belum sepenuhnya berdasar pada sertifikat kepala sekolah (SKS) dari LPPKS.

Standar Sarana dan Prasarana

Indikator sarana dan prasarana yang terpenuhi, meliputi: (1) memiliki luas lahan sesuai ketentuan; (2) memiliki gedung sekolah sendiri; (3) memiliki ruang Kepala Sekolah dengan ruang TU; (4) memiliki sarana/prasarana belajar yang cukup; (5) memiliki ruang laboratorium (IPA Biologi, IPA Fisika, Ruang Perpustakaan dan Ruang Keterampilan; (6) memiliki ruang BK, OSIS, Pramuka, UKS; (7) memiliki ruang guru; (8) terdapat Musholla; (9) terdapat fasilitas olah raga (alat dan lapangan); (10) terdapat gudang dan aula. Indikator yang belum terpenuhi sepenuhnya, antara lain (1) ruang kantor kepala sekolah belum semua

memiliki kamar mandi khusus, (2) perpustakaan dengan fasilitas digital belum merata ke semua sekolah, (3) sarana olah raga ketersediaanya bervariasi.

Standar Pengelolaan

Indikator standar Pengelolaan, meliputi: (1) terdapat rumusan visi-misi, dan tujuan sekolah; (2) memiliki program kerja menengah (4 tahun) dan program kerja tahunan; (3) memiliki dokumen pengelolaan 8 Standar Nasional Pendidikan; (4) memiliki struktur organisasi sekolah; (5) ada program pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; (6) terdapat dokumen pengelolaan pembiayaan; (7) memiliki dokumen pembinaan kesiswaan; (8) memiliki dokumen pengelolaan sarana dan prasarana; (9) ada aturan untuk mengendalikan tata tertib dan keamanan sekolah; (10) memiliki dokumen pengelolaan pembelajaran; (11) memiliki dokumen supervisi guru; (12) memiliki dokumen pengelolaan pegawai. Dari 12 indikator tersebut di atas, indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah supervise guru oleh kepala sekolah. Kepala sekolah masih

memiliki pemahaman beragam terhadap supervise akademik. Masih banyak kepala sekolah memahami supervise akademik sama dengan menilai kinerja guru, pada hal supervise akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi professional guru.

Standar Pembiayaan

Indikator standar pembiayaan yang terpenuhi dari aspek dokumen, meliputi: (1) memiliki dokumen nilai asset; (2) terdapat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS); (3) memiliki modal kerja/anggaran untuk pembiayaan sekolah; (4) memiliki data pembayaran gaji/upah; (5) memiliki anggaran pembiayaan sarana dan prasarana; (6) memiliki anggaran pembiayaan ujian semester, ujian sekolah dan UN; (7) memiliki data sumber dana yang jelas dan teratur; (8) terdapat laporan pertanggung jawaban keuangan tahunan. Semua dokumen tersebut, tersedia di sekolah. Artinya sekolah telah mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien untuk memenuhi standar tersebut. Namun pada umumnya sekolah masih merasakan anggaran yang hanya bersumber dari pemerintah melalui dana

BOS dan *blockgrant* sangat terbatas untuk mengembangkan kreativitas sekolah.

Standar Penilaian Pendidikan

Indikator Standar Penilaian yang terpenuhi, meliputi: (1) setiap guru merancang kriteria penilaian yang di muat dalam silabus; (2) setiap silabus mata pelajaran dilengkapi dengan indikator pencapaian Kompetensi Dasar (KD); (3) guru memiliki dan mengembangkan berbagai instrumen penilaian; (4) setiap mata pelajaran dilengkapi dengan pedoman penilaian sesuai bentuk dan tekniknya; (5) guru memiliki dokumen hasil penilaian; (6) guru menganalisis hasil penilaian untuk kegiatan perbaikan; (7) setiap mata pelajaran di tetapkan KKM-nya; (8) sekolah memiliki program evaluasi semester dan ujian akhir semester; (9) sekolah memiliki dokumen hasil ujian 2 tahun terakhir; (10) sekolah memiliki dokumen penerbitan Ijazah. Hal yang masih menjadi kelemahan pada guru adalah belum menerapkan jenis-jenis tes dalam menilai hasil pembelajaran melalui tes formatif dan tes summative.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Hafid. 2014. *Jangan Pernah Ada Anak Indonesia yang Tertinggal. Orasi Ilmiah. Diesnatalis ke 53 UNM Makassar.*
- Achmady, Z.A. (1995). *Reformasi Administarsi Dalam Pendidikan: Beberapa Pelajaran Tentang Implementasi Kebijakan.* Malang: Universitas Brawijaya.
- Bryk, A., & Schneider, B. (2002). *Trust in Schools.* New York: Russel Sage.
- Bryk. A., Sebring, P., Karbow, D., Rollow, S., & Easton, J. (1998). *Carting Chic School Reform.* Boulder, CO, Westview Press.
- Day, C., Harris, Alma., Hadfied, M., Toley, H., & Beresford, J. (2000). *Leading Schools in Times of Change.* Buckingham. UK: Open University Press.
- Depdiknas. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.* Jakarta.
- (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.* Jakarta.
- (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.* Jakarta.
- Harris, Alma & Lember Linda. (2003). *Buliding Leadership Capacity For School Improvement.* Philadelphia: Open University Press Maidenhead.
- Kemendikbud. (2014). *Pelaksanaan Penilaian Potensi Kepemimpinan Calon Kepala Sekolah/Madrasah*
- (2019). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.*
- Leith, K., Bauer, S., & Riedlinger, B. (2006). *Developing and Sustaining School Principals.* In B. Davies (Ed.), *Sustaining and Developing Leaders.* London Sage.
- Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia. (2013). *Bahan Pembelajaran Diklat Calon Kepala Sekolah.* Solo: LPPKS.
- McLaughlin, M., & Talbert, J. (2006). *Buliding School-Based Teacher Learning Communities.* New York: Teacher College Press.
- Newman, F., King, B., & Young, P. (2000). *Profesional Development that Address School Capacity.* Paper Presntes at the annual meeting of the American Edcation Research Association. New Orleans.
- Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan

- Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011. *Buku Kerja Kepala Sekolah*. Jakarta.
- Pusbangtendik. (2011). *Kepemimpinan Pembelajaran: Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan Kepala Sekolah*. Jakarta: Pusbangtendik.
- Supovitz, J. (2006). *The Case For District-Based Reform*. Cambridge: Harvard Educational Press.
- Tolla, Ismail. (2003). *Pengembangan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar di Sulawesi Selatan*. Hasil Penelitian Ujung Pandang.
-(2010). *Peranan Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pendidikan*. Makalah yang disajikan pada Temu Ilmiah Internasional ISMAPI di Yogyakarta.
- (2015). *Kualitas Leadership Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Manajemen Sekolah dan Kompensi Guru Dalam Pembelajaran*. Makalah: Disajikan dalam Seminas Nasional Forum Pascasarjana UPI di Bandung